

TAJUK RENCANA

Tumpas Sindikat Perdagangan Orang

MESKI sudah lebih 15 tahun memiliki Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan orang (TP-PO) No 21/2007, penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan ini seakan tanpa gigi. Padahal undang-undang tersebut dulu merupakan salah satu perundangan yang cepat dibahas DPR RI, dengan dalih sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan pekerja di luar negeri. Ironisnya, kasus perdagangan orang dengan berbagai modus terus berulang dan terkesan seakan tanpa ada tindakan yang menjerakan pelaku. Padahal UU tersebut, 10 tahun kemudian diikuti lahirnya UU No 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sudah sebulan terakhir ini, pemerintah disibukkan dengan kasus 20 pekerja migran Indonesia (PMI) yang diduga disekap di Myawaddy Myanmar. Kota ini merupakan lokasi konflik militer Myanmar dengan kelompok pemberontak. Ke-20 WNI ini terduga *iming-iming* dua pelaku yang memiliki jaringan internasional, yang menawarkan pekerjaan. Awalnya, dijanjikan kerja di Thailand, tanpa diketahui mereka dibawa ke Myanmar dan masuk jaringan penipuan investasi warga asing. Ke-20 orang tersebut dibawa pindah-pindah dan diduga disekap, disiksa, diperbudak dan diperjualbelikan.

Kali ini pemerintah cukup sibuk. Menkopolkah Mahfud MD kala berbicara di UIN Sunan Kalijaga Kamis (4/5) lalu menyebut telah menyerahkan nama terduga pelaku ke Bareskrim Polri, untuk ditangkap. Mahfud secara gamblang mengungkap telah merancang terapi kejut, *shock therapy* terhadap sindikat TPPO dengan menangkap terduga pelaku atau penyalur di daerah. Tentu, harus ada penelusuran ke daerah terhadap instansi-instansi yang memiliki andil terjadinya TPPO. (KR, 5/5). Apalagi dua bulan sebelumnya, kasus serupa terjadi dengan puluhan PMI yang *diiming-iming* kerja di Kamboja. Pengungkapan kasus Kamboja berhasil menangkap pelaku yang kemudian teridentifikasi telah mengirim PMI ille-

gal sejak 2019. Apakah pelaku memiliki hubungan sindikasi dengan kasus Kamboja? Entahlah. Namun masyarakat tetap berharap, sikap tegas menindak dan menumpas sindikat perdagangan orang hendaknya tidak *hangat-hangat tahi ayam*. Pasalnya, pernyataan perang bisa dikatakan sudah terlambat. Sudah cukup banyak korban dari mereka yang disemati gelar Pahlawan Devisa. Mulai dari yang bekerja bertahun-tahun pulang tanpa membawa upah karena melarikan diri bahkan keputungan dengan perlindungan KBRI, mereka yang mengalami cacat fisik, yang diperkosa bahkan ada yang gila dan juga hilang nyawa. Dan kasus ini muncul sejak belasan tahun silam.

Dalam kurun 2018 - 2022 seperti diungkap Mahfud yang dikutip dalam laman infopublik (7/4) mencapai 2.606 kasus TPPO dimana 50% melibatkan anak dan 46,14% korbannya adalah perempuan. Miris!

Dengan melihat korban anak-anak, sangkaan adanya *kongkalikong* pejabat dengan penjahat tidak lagi samar-samar, namun sungguh jelas. Minimal terjadi pemalsuan dokumen dengan pemalsuan usia. Kian miris, kolaborasi penjahat dan pejabat itu tidak segan-segan mengorbankan saudara sebangsa yang ingin sejahtera dengan rela meninggalkan keluarga dan kampung halaman, untuk keuntungan pribadi mereka.

Jika pemerintah kini menyatakan perang terhadap TPPO dan bersih-bersih hingga ke daerah, tentu harus ada dukungan dan kerja sama semua pihak. Jangan ada yang melindungi oknum pengkhianat yang rela mengorbankan saudara sebangsa. Kuncinya adalah penegakan hukum tanpa tebang pilih.

Saatnya menghentikan dan menumpas sindikat perdagangan orang. Pemerintah lewat Mahfud MD telah menabuh gendang perang. Bangsa ini berharap segera ada aksi dan eksekusi. Jangan hanya digaungkan, namun kasusnya kemudian menghilang. □f

Makna ASEAN bagi Indonesia

A Kardiyat Wiharyanto

KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN akan dilaksanakan 10-11 Mei 2023, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pertemuan akan dihadiri Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara-negara ASEAN, termasuk Timor Leste sebagai negara anggota ke-11 ASEAN dengan status observer. Sedangkan Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus sebagai Ketua ASEAN. Apa makna KTT ASEAN bagi Indonesia?

ASEAN yang lahir 8 Agustus 1967, memang sudah banyak maknanya bagi Indonesia. Jika ditelusur dari sejarah, organisasi itu lahir dari negara-negara yang sebelumnya terlibat konflik. Indonesia baru saja berkonflik dengan Malaysia dalam konfrontasi Malaysia-Indonesia. Demikian juga negara-negara Asia Tenggara yang lain, masih saling curiga akibat perang dingin. Sehingga awal dibentuk merupakan kerja sama ekonomi, sosial dan budaya yang dipatrikan menjadi pengikat.

Belum Tergantikan

Sebagai penggerak berdirinya ASEAN dan sekaligus anggota terbesar perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara itu, Indonesia mau tidak mau harus mencermati segala sesuatu yang terkait dengan masa depan Asia Tenggara, termasuk dalam KTT saat ini. Tujuannya, agar jangan sampai kita bernasib menjadi tamu di negeri sendiri, sementara orang asing malah menjadi tuan di negeri kita.

Dalam dunia yang transparan, organisasi-organisasi internasional maupun regional semacam ASEAN mau tidak mau juga semakin transparan agar kebersamaan dan kerja sama yang dirangkakan dapat terselenggara. Sampai saat ini kesepuluh anggotanya mengakui bahwa peran ASEAN dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan regional belum tergantikan. Mereka juga menggarisbawahi prinsip-prinsip utama yang menopang peran ASEAN sebagai kekuatan bagi perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara, seperti saling menghormati, ti-



KR-JOKO SANTOSA

Asia Tenggara yang dibentuk sebelumnya, seperti ASA maupun Maphilindo. Dalam menghadapi isu-isu global dan menjalin hubungan dengan mitra-mitra dialognya, ASEAN mampu tampil sebagai suatu kesatuan politik sehingga memberi bobot yang lebih besar daripada usaha masing-masing negara anggotanya.

Meskipun demikian, revitalisasi persoalan lama yang pernah dihadapi oleh ASA maupun Maphilindo dan persoalan baru yang timbul karena keberhasilan usahanya di berbagai bidang, justru dapat menjadi sandungan perjalanan ASEAN. Seperti ditunjukkan ASA dan Maphilindo, kedekatan geografis saja ternyata tidak sanggup menyangga regionalitas. Sebaliknya, tanpa dilambori keterikatan politik dan fungsionalisme ekonomi, hal

Partisipasi Publik Pendidikan di Indonesia

Timothy Apriyanto



DEWAN PENDIDIKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEMENTERI-AN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden tahun 2020-2024. Tujuannya, untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Hal ini dilakukan melalui Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Salah satu persoalan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah tentang tata kelola pendidikan dalam satu sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Narasi 'pendidikan gratis' sering ditafsirkan sempit sebagai pendidikan di lingkungan sekolah tanpa membebani biaya apapun kepada keluarga.

Tripusat Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara telah lama mengenalkan kepada kita konsep Tripusat Pendidikan untuk memberdayakan sinergitas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Artinya, terselenggaranya pendidikan merupakan peran dan tanggung jawab kolektif sekolah, keluarga dan masyarakat, termasuk di dalamnya pembiayaan pendidikan.

Sementara itu, masih ada tindakan ataupun sikap kurang terpuji oknum insan pendidikan yang tidak mencerminkan keluhuran budi pekerti. Salah satunya adalah tindakan komersialisasi pendidikan secara berlebihan sebagai bisnis yang menjanjikan. Perihal demikian tentu telah meninggalkan atau mengabaikan tanggung jawab dan nilai moral.

Permasalahan kronis lainnya dalam dunia pendidikan kita adalah adanya pemahaman yang keliru bahwa 'kehebatan manusia' ditentukan kemampuan

nalar atau kecerdasan otak saja. Keberhasilan pendidikan sering dinilai dari luaran kemampuan kerja otak yang diukur secara kuantitatif saja. Sementara itu, hal terkait dengan kualitas moral peserta didik dan pendidik sering terabaikan. Gunawan Santosa (2020) menyatakan bahwa realitas kehebatan manusia di alam semesta ini bukan semata karena otaknya, tetapi karena hatinya. Pengaruh pemikiran positivistik bahwa kehebatan kerja otak manusia seolah mampu menyelesaikan semua masalah, akan menyesatkan kita untuk membentuk manusia sejati yang berakal mulia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 mengingatkan kepada kita bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Pendidikan menghasilkan manusia yang cerdas dan mulia, berkemampuan penalaran maju, dengan moralitas terpuji penuh ketulusan. Namun dalam proses pendidikan terkadang dicerai dengan kebijakan ataupun implementasi program pendidikan yang kurang berkeadilan dan berkeadaban.

Partisipasi Publik

Dalam upaya menguatkan akuntabilitas pendidikan di Indonesia, maka diperlukan partisipasi publik yang konstruktif. Partisipasi publik bermakna bahwa publik proaktif berkontribusi untuk mempengaruhi keputusan publik. Prinsip partisipasi publik menyatakan bahwa mereka yang terkena dampak keputusan memiliki hak untuk terlibat

itu malahan dapat menjelma menjadi kekuatan disintegratif yang mengancam regionalitas dan mengikis regionalisme.

Keberadaan ASEAN merupakan suatu keputusan politik dalam situasi yang sedang bergerak dan tidak mantap sebagai akibat dari pertentangan-pertentangan di antara anggota sendiri maupun dari perebutan pengaruh antara negara-negara adikuasa. Kecuali itu, kawasan yang stabil dan aman akan merupakan lahan yang subur bagi tumbuh-kembangnya pembangunan negara-negara ASEAN dan kerja sama ekonomi, sosial dan kebudayaan di antara negara-negara anggota.

Pra-kondisi

Perdamaian dan stabilitas kawasan ASEAN akan merupakan pra-kondisi bagi berhasilnya baik usaha-usaha pembangunan negara-negara anggota maupun usaha-usaha untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di antara negara anggota dan negara-negara mitra-wicara. Keberhasilan ASEAN sampai saat ini tidak lepas dari peran Indonesia. Indonesia sebagai penggagas dan anggota ASEAN yang terbesar, juga sudah merasakan manfaatnya yang besar.

Agar peran Indonesia semakin menentukan, maka masyarakat harus mendukungnya. Untuk itu, masyarakat harus memahami tentang ASEAN. Mudah-mudahan KTT ASEAN saat ini semakin menyadarkan masyarakat akan makna ASEAN bagi Indonesia. □f

**) Drs A Kardiyat Wiharyanto MM, Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Terharu di Titik Nol

BEBERAPA hari yang lalu saya berjalan-jalan melewati Malioboro ke Selatan. Suasana sudah tidak seramai pekan sebelumnya, maklum libur lebaran sudah usai. Sekalipun siang itu, suasana Malioboro juga tidak sepi-sepi amat. Pesona sepenggal jalan di Kota Yogyakarta itu memang luar biasa.

Semakin ke Selatan, saya merasakan suasana lebih ramai. Pasar Beringharjo sudah tampak bergairah kembali dan di Museum Beteng Vredenburg, saya melihat kelompok anak-anak sekolah ber-seragam menikmati berlari-lari di halaman museum yang luas dan sebagian yang lain duduk-duduk dan berfoto. Memang kelompok-kelompok itu didampingi orang dewasa, yang mungkin guru sekolah mereka. Saya tidak tahu, darimana mereka asalnya. Apakah DIY saja atau luar kota.

Rasa haru tiba-tiba menyeruak di hati. Kawasan itu dan sekitarnya sangat bersejarah bagi perjalanan bangsa. Ada Gedung Agung, Museum dan Beteng Vredenburg, Gedung BI, Kantor Pos dan tentu titik nol. Apakah guru anak-anak itu sekadar mengajak kesitu untuk foto tanpa memberikan penjelasan sejarah kawasan tersebut? Apa itu Gedung Agung, Titik Nol, Beteng Vredenburg dan lainnya? Sekadar tempat selfie ataukah ada kisah lain?

Sejarah tempat-tempat tersebut sangat luar bagi perjalanan bangsa ini. Apakah guru-guru tersebut mempelajari dan menjelaskan sehingga anak-anak memahami maknanya. Jika tidak, jangan salahkan bila anak tidak mengenal sejarah bangsanya. □f

**) Ariyanti, Bausasaran Danukusuman Kota Yogya*

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubaidi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Samarang : Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP